



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUMINAR BUDI SETIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **157438**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **475.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 1015 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **57.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOBIL, SUZUKI WAGON R Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **22.316.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **1.056.994**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **---**

**Sub Total** Rp. **555.872.994**

**III. HUTANG** Rp. **22.300.461**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **533.572.533**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SOLEKHAH
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 760670

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	460.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/90 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, WARISAN Rp. 150.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	26.500.000
1. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER SHORT/KF42 Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	8.900.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	6.111.760
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	501.511.760
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	501.511.760

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS PENANAMAN MODAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ARIF AGUNG SUSAPTO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 776567

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 890 m2/350 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	86.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA G Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	50.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	436.000.000

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 436.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

